



KR-Toto Rusmanro

Kapolres Purbalingga menyerahkan hadiah umrah santri dan kepada polisi berprestasi.

DARI KAPOLRES PURBALINGGA Santri dan Polisi Diumrahkan

PURBALINGGA (KR) - Muhammad Nur Arifin Ilham, santri Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud Purbalingga mendapat hadiah umrah dari Kapolres Purbalingga AKBP Rosyid Hartanto. Hadiah itu diberikan kepada masyarakat berprestasi. "Prestasi Muhammad Nur Arifin Ilham adalah hafal Alquran, hafidz Alquran. Cita-citanya menjadi guru dan orang tuanya guru honorer," kata Kapolres, usai upacara laporan kenaikan pangkat di halaman Mapolres Purbalingga, Senin (2/12).

Selain santri itu, kapolres juga menghadaiah umrah kepada anggota polisi berprestasi. Masing-masing Kabag Ops Polres Purbalingga Kompol Tri Arjo Irianto dan Penata Tingkat I Ganang Waluyo yang berprestasi dalam bidang tugasnya sebagai Kasubbag Dalprogar Bargian Perencanaan Polres Purbalingga.

Prestasi Kompol Tri Arjo selaku Kabag Ops berhasil memimpin tugas pengamanan Pilkada 2024 sehingga wilayah Purbalingga dapat tetap aman dan kondusif. "Pemberian penghargaan ini wujud rasa syukur terkait pelaksanaan pengamanan Pilkada 2024 di wilayah Purbalingga yang berjalan aman, damai dan lancar. "Sebagai wujud rasa syukur, saya selaku pimpinan di Polres Purbalingga memberikan *reward* kepada personel berprestasi berupa ibadah umrah," jelas AKBP Rosyid. **(Rus)-f**

KTP DIGITALI DI SUKOHARJO Ditargetkan Capai 25 Persen

SUKOHARJO (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sukoharjo terus mengejar target 25 persen atau 170.000 penduduk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital hingga akhir 2024. Capaian sekarang baru sekitar lima persen. Artinya masih ada 20 persen lagi untuk memenuhi target pemerintah pusat, yakni 25 persen yang harus direalisasikan," kata Kepala Dispendukcapil Sukoharjo Budi Susetyo, Senin (2/12).

Berdasarkan data Dispendukcapil Sukoharjo, diketahui jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP sekitar 680.000 orang. Pemerintah pusat menetapkan target 25 persen atau 170.000 orang sampai akhir 2024 aktivasi KTP digital bisa tercapai. Namun capaian KTP digital di Kabupaten Sukoharjo baru terealisasi 32.000-35.000 orang atau 4-5 persen. "Kami berusaha maksimal mencapai target tersebut. Diharapkan Desember ini penambahan kepemilikan KTP digital meningkat secara signifikan," tandas Budi Susetyo.

Dispendukcapil Sukoharjo melihat kecilnya angka capaian aktivasi KTP digital sampai saat ini karena rendahnya kesadaran masyarakat. Capaian angka 4-5 persen tersebut justru datang dari upaya Dispendukcapil Sukoharjo jemput bola dengan mendatangi warga yang sudah memiliki KTP.

Budi menjelaskan, integrasi KTP digital dengan pelayanan publik dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses digitalisasi di era modern. Nantinya masyarakat cukup menggunakan KTP digital akan langsung terhubung dengan semua layanan publik. **(Mam)-f**

DICEK KAPOLRES TEMANGGUNG Alsud dan Personel Samapta



KR-Zaini Arrosyid

Kapolres Temanggung memeriksa peralatan khusus dan personel di Mapolres setempat.

TEMANGGUNG (KR) - Peralatan khusus (alsud) dan kesiapan personel Satuan Samapta Polres Temanggung mendapat pemeriksaan dari Kepala Polres Temanggung AKBP Ary Sudrajat, Selasa (3/12). Pengecekan peralatan rutin dilaksanakan bertujuan untuk memastikan kelayakan alat digunakan dan tidak ada kendala saat digunakan.

Jika ada kerusakan peralatan, dapat segera diperbaiki dan diganti," jelas AKBP Ary Sudrajat. Menurutnya, kesiapan peralatan maupun personel perlu dilakukan agar semua peralatan yang nantinya akan digunakan dalam keadaan baik dan layak digunakan.

Peralatan khusus yang dicek meliputi flashball, amunisi flashball, tameng dalmas beserta tongkatnya, body protector dalmas, body protector raimas, megaphone, tali dalmas, serta peralatan khusus lainnya. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kondisi alsud yang dimiliki Polres Temanggung masih dalam kondisi baik dan siap digunakan sewaktu-waktu. "Amunisi maupun flasball belum kadaluwarsa dan sesuai prosedur yang ada," ungkap Kapolres.

Kasat Samapta AKP Nyoto menjelaskan pengecekan alsud pada Sat Samapta perlu dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan serta merupakan wujud kesiapan personel Polres Temanggung dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif setelah Pilkada 2024 di Kabupaten Temanggung. **(Osy)-f**

3 PROYEK INFRASTRUKTUR DI KARANGANYAR

Pengerjaan Terkendala Cuaca dan Logistik

KARANGANYAR (KR)

- Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengupayakan kendala cuaca dan faktor lapangan tak membuat penyelesaian tiga proyek infrastruktur luput dari target. Penggunaan teknologi yang lebih efisien bakal dilakukan.

Demikain dikatakan Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi usai meninjau proyek pembuatan jalan alternatif Gayamdampo-Popongan, pelebaran jalan dan pemasangan saluran drainase Perumnas Palur, serta pembangunan jembatan Dalon-Ngrancang termasuk rehab Jalan Wonorejo-Jatikuwung, Senin (2/12).

"Kita pastikan semua selesai tepat waktu di akhir tahun ini. Faktor cuaca seharusnya bukan jadi kendala, karena bisa diatasi dengan penggunaan teknologi maupun percepatan lainnya," ungkap Timotius kepada wartawan di Palur.

Pembangunan jalan alternatif Gayamdampo-Po-

pongan, jelas Timotius, akses itu untuk memudahkan menuju Training Camp National Paralympic Committee (TC NPC) di Delingan. Proses pembangunan jalan alternatif tahap pertama sepanjang 800 meter ditarget selesai 20 Desember 2024. Menurutnya, mobilitas logistik atau material menggunakan truk relatif kesulitan ke lokasi. "Badan jembatan yang dibangun cukup tinggi sehingga truk material kesulitan menanjak," jelasnya.

Timotius mengakui, lokasi proyek tidak semuanya mulus sehingga truk pengangkut material kerap terjebak di kubangan lumpur.

"Jalur alternatif ini dibangun multiyears. Selain membutuhkan anggaran cukup besar, juga perlu membebaskan tanah milik warga," ungkapnya. Terkait problem ini, pembebasan lahan akan dikonsultasikan ke bupati Karanganyar terpilih setelah



KR-Abdul Alim

Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi meninjau pengaspalan jalan di Perumnas Palur.

menjabat secara definitif.

Di proyek pelebaran, pengaspalan dan pembuatan saluran drainase di Perumnas Palur, Timotius optimistis selesai sebelum natal dan tahun baru. Ia meyakini rekanan memiliki sumber daya mencukupi untuk memenuhi komitmen. Begitu pula un-

tuk pengerjaan jembatan Dalon-Ngrancang termasuk rehab Jl Wonorejo-Jatikuwung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Asihno mengatakan pengerjaan fisik di Perumnas Palur, jembatan Dalon-Ngrancang serta rehab Jl Wonorejo-Jatikuwung diu-

ayakan selesai sepekan. Ia menyebut proyek di Perumnas Palur menelan anggaran Rp 3,8 miliar, pengerjaan jembatan Dalon-Ngrancang termasuk rehab Jalan Wonorejo-Jatikuwung Rp 2,5 miliar, dan jalan alternatif Gayamdampo-Popongan Rp 2 miliar. **(Lim)-f**

STOK BERAS DI GUDANG BULOG TEGAL

Cukupi Kebutuhan Hingga Januari 2025

TEGAL (KR) - Ketersediaan beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog Cabang Tegal sebanyak 30 ribu ton, masih mampu mencukupi Kebutuhan masyarakat hingga Januari 2025 mendatang. Pimpinan Bulog Cabang Tegal, Anna Marianofa mengatakan, bahwa pihaknya melakukan pengadaan beras petani dengan mengacu pada Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp11 ribu per kilogram hingga sampai di gudang.

beras perbulan.

"Dengan kemampuan penyerapan itu, kami optimistis ketersediaan beras hingga awal 2025 tetap terjaga. Kami pastikan stok aman dan masyarakat tak perlu khawatir terkait ketersediaan beras," tutur Anna.

Terkait dengan pendistribusian bantuan pangan, menurut

Anna, pihaknya telah mendistribusikan 7.370 ton beras kepada warga miskin yang berada di tujuh kabupaten/kota eks-Karesidenan Pekalongan selama 2024. Bantuan pangan 7.370 ton beras itu didistribusikan kepada wajib penerima di eks-Karesidenan Pekalongan, meliputi Kabupaten/Kota Tegal, Brebes, Slawi, Pemalang, Kabupaten/Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang.

Penyaluran bantuan pangan di wilayah Kabupaten Batang hingga tahap ketiga ini, mencapai sekitar 829 ton. "Penyaluran bantuan pangan yang didistribusikan secara bertahap itu sudah selesai sejak Oktober 2024 lalu. Setiap penerima bantuan

pangan mendapatkan jatah 10 kilogram," tegas Anna.

Sementara hasil lacakan KR di lapangan, masih banyak warga miskin di Tegal yang belum pernah mendapat bantuan beras dari pemerintah, salah satunya seorang janda miskin, Khotimah (67), yang sekarang menempati ruang kelas bekas bangunan SDN Martoloyo Kecamatan Tegal Timur.

"Saya sudah berkali kali mengadu ke kelurahan sampai Dinsos, tapi hingga kini belum pernah dapat bantuan pangan atau uang dari pemerintah, sedangkan banyak warga yang punya rumah, punya motor, tapi dapat bantuan beras," kata Khotimah. **(Ryd)-f**

DIMINTA SEGERA KOORDINASI DENGAN PEMPROV JATENG

Mendesak, Sukoharjo Harus Tambah 3 SMA Negeri

SUKOHARJO (KR)

- Badan Anggaran DPRD Sukoharjo memerintahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat untuk berkoordinasi dengan Disdikbud Provinsi Jawa Tengah agar pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Gatak dan Grogol bisa segera direalisasikan. Koordinasi diperlukan, mengingat SMA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.

"Pembangunan dua SMA itu sudah sangat mendesak, mengingat banyak lulusan SMP di wilayah Gatak dan Grogol kesulitan mendapat sekolah tingkat SMA saat tahun ajaran baru. Pembangunan SMA memang mendesak segera dilakukan bahkan telah dibahas bersama di Badan Anggaran melibatkan DPRD dan Pemkab Sukoharjo,"

kata Ketua DPRD Sukoharjo sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Sukoharjo, Nurjayanto, Minggu (1/12).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo, Heru Indarjo mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah minta kepada Pemprov Jateng serius menambah SMAN dan SMKN di Kabupaten Sukoharjo. Penambahan mendesak dilakukan di wilayah padat penduduk namun kurang fasilitas sekolah tingkat SMA/SMK.

"Selama ini anak lulusan SMP di Grogol, Gatak dan Baki mengalami kesulitan mencari SMAN dan SMKN. Untuk sekolah di luar daerah, terkendala sistem zonasi," tegasnya.

Menurut Nurjayanto, wilayah Kecamatan Gatak dan Grogol memiliki kepadatan penduduk

cukup tinggi.

Hal itu terlihat dengan banyaknya anak usia sekolah, namun kondisi tersebut tidak sebanding dengan fasilitas sekolah negeri tingkat SMA. Lulusan SMP dari dua kecamatan tersebut selalu mengalami kesulitan mendaftar ke SMA. Mereka sering tidak diterima di SMA Negeri, salah satunya karena faktor jarak atau penerapan sistem zonasi.

Selain itu, kebanyakan lulusan SMP dari Kecamatan Gatak dan Grogol mendaftar SMA di wilayah Kota Solo. Namun juga banyak yang tidak diterima karena sistem zonasi.

"Akhirnya anak-anak lulusan SMP dari Grogol dan Gatak sekolah di SMA swasta yang ada di Kota Solo," ungkap Nurjayanto.

Disebutkan, saat ini di Kecamatan Gatak dan Grogol memi-

liki sekolah tingkat SMK, masing-masing satu SMK. Rinciannya, SMKN 3 Sukoharjo di Kecamatan Grogol, sedangkan SMKN 6 Sukoharjo di Kecamatan Gatak. Satu lagi, SMKN 4 Sukoharjo di Kecamatan Baki. "Kebutuhan penyediaan fasilitas pendidikan SMA di Kecamatan Grogol, Gatak dan Baki mendesak harus disediakan," tandas Nurjayanto.

Pansus DPRD Sukoharjo

Dalam rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024-2044, Pansus DPRD Sukoharjo juga telah merekomendasikan lahan untuk pembangunan SMA) di Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol dan Kecamatan Gatak. Hal itu mengingat pembangunan SMA di tiga kecamatan tersebut. **(Mam)-f**

DITEMUKAN ADA 1.734 NAMA SUTIKNO

Kominfo Pati Tingkatkan Kualitas Wartawan

PATI (KR) - Nama Sutikno di Kabupaten Pati Jateng tercatat ada 1.734 orang sehingga sering membuat repot saat membuat rekening baru di bank.

"Ini juga dialami wartawan bernama Sutikno. Ternyata ia sulit membuat rekening baru karena ada kembaran nama Sutikno sampai 1.734. Padahal, honor FGD harus ditransfer secara nontunai ke rekeningnya," kata Kabid Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab Pati) Ida Istiyani SSOs MM, Selasa (3/12).

Ida Istiyati mengungkapkan hal itu setelah pelaksanaan Forum Diskusi Grup (FGD) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informasi Pati, yang dipimpin Kepalaans, Ratri Wijayanto SSTP MSI.

Ratri juga mengungkap ba-

nyaknya orang yang mengaku sebagai wartawan dan ingin dicatat sebagai mitra. Diakuinya, pada tahun kerja 2025 menda-

tang Diskominfo Pati akan menambah lima wartawan dari berbagai media sebagai mitra. Selain itu, anggaran perss tour



KR-Alwi Alaydrus

Kepala Diskominfo saat memimpin FGD untuk para wartawan setempat.

akan dianikkan, dari semula Rp 30 juta menjadi Rp 40 juta.

Ratri Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya juga akan membantu peningkatan kualitas wartawan di Kabupaten Pati. Di antaranya akan memperjuangkan anggaran khusus untuk uji kompetensi wartawan (UKW).

Kepala Diskominfo Pati menekankan pentingnya FGD sebagai langkah strategis untuk menciptakan karya jurnalistik yang informatif dan akurat untuk mendukung pembangunan daerah.

"Kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat dan terpercaya terus meningkat, sehingga penting untuk memperkuat kompetensi jurnalis melalui FGD," tegas Ratri Wijayanto. **(Cuk)-f**